

BAB IV

RESPON KOREA SELATAN TERHADAP JAPAN'S NEW SECURITY BILLS

Pemerintah Korea Selatan secara tegas merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang, dengan sikap politik luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang yang menerapkan *Two-Track Diplomacy* yang berarti Korea Selatan tidak menginginkan untuk melupakan sejarah dan juga mempertimbangkan implikasi terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan, semakin mendukung keputusan tersebut. Untuk itu dalam bab empat ini, penulis akan menjelaskan mengenai bentuk respon negatif yang diberikan pemerintah Korea Selatan dan beberapa alasan signifikan yang menyebabkan pemerintah Korea Selatan merespon negatif terhadap pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Bab ini juga sekaligus menjadi bagian untuk pengaplikasian konsep dan teori yang penulis gunakan dalam kerangka dasar pemikiran yaitu konsep kepentingan nasional dan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam menjelaskan alasan Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.

A. Bentuk Respon Korea Selatan Terhadap Pemberlakuan Japan's New Security Bills

Selain kekhawatiran Korea Selatan terhadap agresi militer Korea Utara dan meningkatnya kekuatan militer Cina, pemerintah Korea Selatan harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Jepang telah memberlakukan undang-undang

keamanannya yang baru atau *Japan's New Security Bills*. Pemberlakuan *Japan's New Security Bills* memicu kemarahan besar dari pemerintah Korea Selatan.

Dalam reinterpretasi baru konstitusi Pasifik pasca Perang Dunia II, militer Jepang diperbolehkan memberikan bantuan kepada sekutunya dalam pertempuran. Sementara langkah tersebut telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat, banyak anggota parlemen di Korea Selatan, yang pada masa lalu secara brutal dijajah oleh Jepang pada tahun 1910-1945, melihatnya sebagai tanda ambisi kekaisaran Jepang. Di Korea Selatan tingkat dukungan terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe tidak lebih banyak dari tingkat dukungan terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tetapi pemerintah Korea Selatan bereaksi relatif menahan diri terhadap pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.¹

Meski bertindak relatif menahan diri, pemerintah Korea Selatan tetap menginginkan transparansi militer Jepang dalam melakukan praktik *collective self-defense* di Semenanjung Korea. Pada 19 September 2015, pemerintah Korea Selatan menekankan kepada pemerintah Jepang bahwa Korea Selatan tidak akan mentolelir berbagai macam tindakan militer oleh Jepang di Semenanjung Korea tanpa persetujuan pemerintah Korea Selatan. Selain itu didasarkan pada penghormatan mutlak kedaulatan tiga negara. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Korea Selatan Noh Kwang-il dalam *Media Briefing* di Seoul juga mengatakan pentingnya transparansi pemberlakuan undang-undang Keamanan Jepang. Sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

¹Ashley Rowland & Yoo Kyong-chang, Juli 2014, “*South Korea tempers response to Japan's expanded military role*” Stars And Stripes dalam <http://www.stripes.com/news/south-korea-tempers-response-to-japan-s-expanded-military-role-1.292268>. Diakses pada 3 Desember 2016

*"Japan should transparently move forward in deciding and implementing its defense and security policies in line with the spirit of the Pacifist Constitution that has been in place during the postwar era."*¹²

"*Japanese Boots on the Ground*" menjadi sesuatu yang paling ditakutkan Korea Selatan saat militer Jepang menginjakkan kaki di Semenanjung Korea di samping tidak adanya pernyataan pemerintah Jepang, dokumen, maupun proposal yang mengindikasikan maksud dan tujuan militer Jepang tersebut. Sebaliknya Jepang akan terus menghindari resiko apapun bagi pasukan militernya.

Pemerintah Korea Selatan berulang kali menuntut pemerintah Jepang untuk mengerti bahwa militer Jepang akan memerlukan izin Korea Selatan setiap sebelum melakukan operasi keamanan Korea. Pemerintah Jepang telah memberikan jaminan tersebut. Pada tahun 2014 dan lagi pada bulan Oktober 2015, Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani bersumpah bahwa angkatan bersenjata Jepang tidak akan melakukan praktik *collective self-defense* ke Korea tanpa izin pemerintah Korea Selatan. Pada bulan Mei 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa *self defense forces* tidak akan mendarat di wilayah negara asing dan menggunakan kekuatan di sana. Sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"It will never happen that the SDF will land on the territories or territorial waters of foreign countries and use force there."

¹²Yi Whan-woo, 20 September 2015, "Japan's new laws raise Asia's security concerns," The Korea Times dalam http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/09/120_187193.html. Diakses pada 25 Oktober 2016

Pemerintah Korea Selatan telah mengakui jaminan Jepang, namun terus menuntut transparansi publik dan mengungkapkan kekhawatiran. Pada bulan Juli 2014, *South Korean Chairman* Cho Yoon-hee menyatakan bahwa Jepang telah menyetujui permintaan pemerintah Korea Selatan untuk meminta izin terlebih dahulu setiap kali akan melakukan praktik *collective self-defense* di zona operasional Korea, dan tidak dapat dilakukan apabila tidak ada izin dari pemerintah Korea Selatan.

Pada bulan April 2015, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berkomentar:

*“We take note of the fact that the U.S. and Japan have made it clear that they would fully respect the sovereignty of a third country when it comes to Japan’s exercise of the right to collective self-defense. Our government’s demands concerning the security of the Korean Peninsula and our security interests have been reflected in these guidelines.”*³

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga mengeluarkan pernyataan dalam menanggapi pemberlakuan *Japan’s New Security Bills* mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan mentolerir praktik *collective self-defense* tanpa persetujuan pemerintah Korea Selatan atau persetujuan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan Semenanjung Korea atau kepentingan nasional Korea Selatan.

“We will never tolerate any exercise of such right without the Republic of Korea’s request or consent on matters that can affect the security of the Korean Peninsula or national interests of the Republic of Korea.”

3 Bruce Klingner, 2016 “*Japanese Defense Reform Supports Allied Security Objectives*” Alliances dalam <http://www.heritage.org/research/reports/2016/01/japanese-defense-reform-supports-allied-security-objectives>. Diakses pada 4 Desember 2016

Pada bulan Juni 2015, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan Jepang Nakatani menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak akan membawa angkatan bersenjata ke Semenanjung Korea tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Korea. Kemudian pada bulan September 2015, Menteri Pertahanan Han Min-koo menyatakan bahwa angkatan bersenjata Jepang tidak dapat melakukan apapun di Semenanjung Korea kecuali ada otoritas yang diberikan Presiden Korea Selatan. Sebagai mana yang dikutip sebagai berikut :

*“Japan’s armed forces cannot impact events in the country unless South Korea’s president grants authorization.”*⁴

Terhitung sampai awal 2016, Presiden Park Geun-hye tetap melanjutkan sikap waspada yang terukur menanggapi pemberlakuan *Japan’s New Security Bills*. Pemerintah Korea Selatan berusaha untuk bersikap setenang mungkin dengan menunggu dan melihat dengan jelas bagaimana militer Jepang memberlakukan *Japan’s New Security Bills* pada praktik *collective self-defense* mereka. Strategi politik membuat Presiden Park Geun-hye berusaha menahan diri meskipun sudah dengan jelas bahwa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan’s New Security Bills*.

“There are strategic and political reason (for Park) to wait. It’ll be, at least for a while, business as usual.”

Banyak media Korea Selatan yang melaporkan sebagian besar anggota parlemen Korea Utara mendorong pemerintahan Presiden Park Geun-hye untuk

⁴*Ibid.*

mengambil sikap yang lebih vokal terhadap pemerintah Jepang atas pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Menurut Lee One-koo dari *National Assembly floor* Jepang berjalan pada jalur yang salah karena negara yang normal tidak akan membuat kebijakan seperti itu di abad ke-21, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

“Japan is walking on a path deviating from what normal countries should do in the 21st century.”

Banyak masyarakat Korea Selatan percaya bahwa Jepang belum sepenuhnya mengakui kekejaman yang dilakukan selama pendudukannya atas Semenanjung Korea, termasuk penggunaan "wanita penghibur" atau budak seks. Masalah-masalah lain yang mengganggu hubungan antar tetangga di Asia Timur termasuk klaim ganda kepemilikan pulau Dokdo/Takeshima dan penggambaran sejarah dalam buku teks sekolah.⁵

Menurut *The Associated Press*, Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan kepada media setelah *Japan's New Security Bills* disahkan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk melindungi kehidupan rakyat dan penghidupan damai mereka, dan itu adalah untuk mencegah perang. Tetapi Korea Selatan menganggap selama Jepang belum secara resmi meminta maaf atas kekejaman masa perang, Korea Selatan meragukan bahwa pemberlakuan *Japan's New Security Bills* semata-mata diarahkan pada tujuan bersama yaitu menstabilkan perdamaian di wilayah regional Asia Timur. Park Young-jun seorang Professor di *Korea National Defense University* mengatakan bahwa Jepang selalu membuat ragu atas semua kebijakan yang dibuat jika berkaitan dengan isu sejarah apalagi isu persengketaan

⁵Ashley Rowland & Yoo Kyong-chang. *Loc., Cit*

pulau. Ia pun menambahkan bahwa keadaan normal suatu negara berarti negara tersebut mampu untuk tidak menimbulkan potensi perang dengan negara lain.

Sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

*“The truth is that Japan has consistently maintained a doubtful stance on historical issues, including wartime sexual slavery, and unnecessarily brought up territorial disputes. If Japan sincerely wants to return to a ‘normal state’ like Germany and Italy have in the 21st century, it must show efforts to ease distrust held by neighboring allies stemming from historical and territorial feuds. And a “normal state” refers to a country capable of waging war against other countries.”*⁶

Pada kenyataannya Korea Selatan lebih takut kepada kebangkitan militer Jepang karena masih mengingat militerisme Jepang di tahun 1930-an, dari pada takut dengan ancaman di masa sekarang misalnya ancaman dari Korea Utara maupun Cina. Jajak pendapat menunjukkan 60 persen responden Korea Selatan menganggap Jepang sebagai ancaman militer sementara hanya 34 persen menganggap China sebagai ancaman.

B. Alasan Korea Selatan Merespon Negatif Pemberlakuan Japan’s New Security Bills

Tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan nasional Korea Selatan masih dipengaruhi isu emosional disamping isu yang riil secara fisik seperti melindungi wilayah ataupun menjaga stabilitas ekonomi hingga keamanan. Pada kenyataannya masyarakat Korea Selatan masih larut dalam bayangan sejarah masa lalu imperialisme Jepang dari tahun 1910 hingga tahun 1945 yang meninggalkan trauma mendalam. Maka akan sangat wajar ketika kepentingan nasional Korea

⁶ Lee Sung-eun, September 2015, “*Seoul stays tough on Japan’s security laws*” Korea JoongAng Daily dalam <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3009437>. Diakses pada 3 Desember 2016

Selatan selain untuk selalu melindungi keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonominya, juga harus melindungi kemerdekaan yang telah diraih karena bagaimana pun juga Korea Selatan tidak ingin merasakan kembali kekejaman imperialisme Jepang. Meskipun *Japan's New Security Bills* salah satunya memiliki tujuan untuk melindungi keamanan regional, bagi masyarakat Korea Selatan Undang-undang tersebut seperti hal yang dapat memicu sebuah peperangan. Sangat wajar saat pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan luar negerinya untuk merespon negatif pemberlakuan Undang-undang tersebut jika mempertimbangkan kepentingan nasional Korea Selatan.

Sebagaimana pernyataan Reynolds bahwa kepentingan nasional adalah basis dari pembentukan kebijakan luar negeri, maka kepentingan nasional Korea Selatan mempengaruhi pengambilan keputusan luar negerinya. Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin terdapat empat faktor yang mempengaruhi secara signifikan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tersebut diantaranya kondisi politik suatu negara, pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah sebagai aktornya, kemudian kondisi kemampuan ekonomi dan militer, hingga konteks internasional dalam hal ini mengenai *hostility* negara satu dengan negara lainnya. Ke empat faktor tersebut juga menjadi alasan signifikan yang mempengaruhi pemerintah Korea Selatan dalam mengambil keputusan luar negeri untuk merespon pemberlakuan *Japan's New Security Bills* dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Korea Selatan.

a. Kondisi Politik Domestik Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan

Presiden Park Geun-hye

Kondisi politik domestik Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Park Geun-hye merupakan Presiden ke-11 sekaligus Presiden pertama wanita Korea Selatan dan melayani masa jabatan presiden ke-18. Masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye menjadi masa pemerintahan yang dapat dikatakan berperan “banyak” menjadikan kondisi politik domestik Korea Selatan tidak stabil.

Instabilitas politik domestik Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye disebabkan oleh banyaknya skandal politik yang terjadi di lingkungan pemerintah sehingga mempengaruhi rasa percaya masyarakat Korea Selatan terhadap pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Pemerintahannya yang dimulai sejak Februari 2013 ini dinilai sebagai pemerintahan yang konservatif, hal tersebut tercermin dari sikap politiknya yang salah satunya dianggap berorientasi pada penundaan perkembangan demokrasi. Tetapi para pendukungnya mengelak penilaian tersebut dan menyebut pemerintahan Presiden Park Geun-hye berkontribusi besar pada peningkatan ekonomi Korea Selatan.⁷

Setahun setelah pemerintahan Presiden Park Geun-hye, pada pertengahan 2014 Korea Selatan mengalami duka akibat kecelakaan transportasi terbesar yaitu tenggelamnya kapal *Ferry Sewol*. Kecelakaan ini merupakan bencana nasional dan sempat mempengaruhi rating dukungan kepada Presiden Park Geun-hye dan

⁷ Politicoscope, November 2016, “ *SOUTH KOREA POLITICS: Park Geun-hye Biography And Profile*,” Politicoscope dalam <http://politicoscope.com/2016/11/07/south-korea-politics-park-geun-hye-biography-and-profile/>. Diakses pada 30 November 2016

pemerintahannya. Meskipun peristiwa tersebut diliput dengan sangat intens oleh media Korea Selatan tetapi masyarakat sempat mengeluhkan terlalu banyaknya “*media coverage*” untuk menyelamatkan muka pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Ikut campur pemerintah dalam mempengaruhi informasi yang disampaikan media kepada masyarakat Korea membuat peringkat dukungan Presiden Park Geun-hye turun dengan tajam, bahkan terdapat masyarakat Korea Selatan yang menuntut Presiden Park Geun-hye untuk mengundurkan diri. Terbukti dengan adanya protes dari delapan orang mahasiswa yang memanjat patung *landmark* raja kuno Korea Selatan di pusat Kota Seoul dengan menunjukkan *banner* yang berisi keinginan mereka agar Presiden Park Geun-hye mengundurkan diri dari jabatan presidennya. Aksi delapan orang mahasiswa ini berhasil diselesaikan dengan cepat oleh pihak kepolisian setempat.

Sebanyak 273 orang ditemukan telah meninggal dalam bencana transportasi tersebut, mayoritas dari mereka adalah siswa sekolah menengah atas. Pada saat itu penyelam berusaha mencari kapal *ferry* yang tenggelam dan mencari keberadaan sekitar 31 orang yang masih hilang lebih dari tiga minggu setelah kapal kelebihan beban tersebut tenggelam di lepas barat daya Korea Selatan. Presiden Park Geun-hye telah meminta maaf beberapa kali karena pemerintahannya gagal mencegah bencana dan Ia mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya dalam penyelamatan. Di bawah tekanan yang besar pada peristiwa bencana transportasi tersebut, Presiden Park telah bersumpah untuk memberlakukan hukuman tegas kepada pihak yang dianggap bersalah atas kecelakaan tersebut, Presiden juga menyalahkan kecelakaan pada "kejahatan berakar dari masa lalu atau *the deep-rooted evils from the past*" keserakahan

korporasi dan hubungan kolusif antara perusahaan dan regulator. Presiden mengatakan bahwa terdapat kelemahan dan pearturan yang longgar dalam hal tingkat keamanan kapal yang tenggelam tersebut.⁸

Setelah satu tahun Presiden Park Geun-hye dan pemerintahannya dikritik karena kegagalan dalam mencegah bencana nasional kecelakaan tenggelamnya kapal *ferry* Sewol, citra Pemerintahan Presiden Park Geun-hye semakin memburuk saat upaya pemerintah dalam menangani masalah *Middle East Respiratory Syndrome* atau MERS dianggap lamban oleh masyarakat Korea Selatan. Dengan rating dukungan terhadap pemerintahannya yang terus turun, kritikus dan analis politik sama-sama mempertanyakan kepemimpinannya sebagai kepala negara dalam menghadapi masalah-masalah mendesak seperti perlambatan ekonomi, sistem pensiun nasional yang terus menunggu perbaikan, serta ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara. Choi Jin, yang merupakan *director of the Institute of Presidential Leadership* di Seoul juga mengkritik cara kerja pemerintahan Presiden Park Geun-hye yang selalu lamban dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti yang dikutip berikut ini :

“She is too slow, too closed, to be able to deliver a timely message to her people at a time like this. She has turned out to be the most shut-off and people-averse president we ever had. I have serious doubts about the rest of her term.”

Sejak kasus pertama virus MERS, pada tanggal 20 Mei dikonfirmasi Korea Selatan telah terinfeksi sebanyak 137 orang, termasuk 14 orang yang telah meninggal. Wabah penyakit MERS ini adalah yang terburuk yang dilaporkan

⁸ Choi Sang-hun, May 2014, “*South Korea’s Leader and Media Face Scrutiny Over Ferry Disaster*,” The New York Times dalam <http://www.nytimes.com/2014/05/10/world/asia/south-koreas-leader-and-media-face-scrutiny-over-ferry-disaster.html>. Diakses pada 30 November 2016

terjadi di luar Arab Saudi, di mana penyakit ini muncul pada tahun 2012. Lebih dari 3.600 orang pada saat itu diamati untuk gejala, dan lebih dari 2.900 sekolah ditutup. Wabah penyakit dari virus MERS ini sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap perekonomian Korea Selatan, karena terdapat kebijakan seperti distrik perbelanjaan di Seoul disterilkan dari pengunjung orang Cina yang merupakan sumber pendapatan terbesar wisatawan asing untuk Korea Selatan. Selain itu terdapat kebijakan lain yang timbul dari adanya wabah penyakit MERS ini, yakni *Bank of Korea* memangkas suku bunga ke rekor rendah di tengah kekhawatiran bahwa ekonomi bisa merosot lebih jauh. Wabah penyakit dari virus MERS ini telah membuktikan kegagalan dalam sistem kesehatan publik Korea Selatan.⁹ Akibatnya kepemimpinan Presiden Park Geun-hye terus dipertanyakan, dalam sebuah survei yang dilakukan salah satu lembaga survei yang bernama *Gallup Korea*, rating dukungan terhadap pemerintahan Presiden Park Geun-hye yang sebelum terjadi wabah penyakit virus MERS memiliki sekitar 40 persen dukungan, setelah terjadi wabah penyakit virus MERS ini hanya tersisa 33 persen dukungan masyarakat Korea terhadap pemerintahannya.¹⁰

Merespon tekanan domestik yang begitu besar, Presiden Park Geun-hye sempat menunda pertemuannya dengan Presiden Barack Obama di Washington DC. Kim Ji-yoon seorang analis politik di *Asian Institute for Policy Studies* di Seoul menganggap bahwa tindakan Presiden Park Geun-hye menunda pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat tidak memberikan kesan yang baik selain

9Choi Sang-hun, Juni 2015, “*MERS Tarnishes Korean President’s Image as Leader*,” The New York Times dalam http://www.nytimes.com/2015/06/13/world/mers-tarnishes-korean-presidents-image-as-leader.html?_r=0. Diakses pada 30 November 2016

10 Steven Denney, Januari 2016, “*2015 Ends on a Higher Point for South Korea’s President Park*” The Diplomat Magazine dalam <http://thediplomat.com/2016/01/2015-ends-on-a-higher-point-for-south-koreas-president-park/>. Diakses pada 30 November 2016

menunjukkan inkonsistensi dirinya. Bahkan media konservatif yang besar yang biasa mendukung pemerintahan Presiden Park Geun-hye mulai memberikan serangan politiknya di tengah wabah MERS yang terus menyebar. Media tersebut mengatakan bahwa Presiden Park Geun-hye telah gagal menyadari terjadinya krisis nasional sejak awal dan komunikasinya yang terbatas kepada masyarakat Korea Selatan, Presiden Park Geun-hye cenderung berkomunikasi ketika terdapat opini yang populer yang menentang pemerintahannya. Media tersebut juga mencatat bahwa Presiden Park Geun-hye tidak mengadakan pertemuan menteri kabinet dengan *civilian expert* mengenai MERS hingga dua minggu setelah wabah penyakit virus MERS menyebar. Banyak instansi pemerintahan yang tumpang tindih dalam menangani krisis nasional MERS ini, yang menimbulkan kritik mengenai tidak adanya pemerintahan yang efisien, hal tersebut juga pernah terjadi semasa Korea Selatan dihadapkan pada bencana nasional kecelakaan kapal *ferry* Sewol. MERS merupakan kasus besar yang baru terjadi di Korea Selatan, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Korea Selatan membutuhkan informasi yang banyak dan akurat mengenai virus tersebut, pemerintahan Presiden Park Geun-hye dianggap merahasiakan informasi penting dari masyarakat Korea Selatan seperti menolak untuk mempublikasikan nama-nama rumah sakit dengan pasien yang terinfeksi, rute penyebaran penyakit ini, atau rincian upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan rantai penularan. Peter Ben Emberek, seorang ahli virus MERS mengatakan kurangnya informasi dapat dengan mudah membuat kecemasan dan ketakutan di masyarakat.¹¹

11 Choi Sang-hun, *Loc.Cit*

Citra Presiden Park Geun-hye sebagai Presiden yang tertutup telah didukung oleh keengganannya untuk menghadapi media. Tahun 2014 Presiden Park hanya mengadakan satu konferensi pers. Tahun 2015, hanya satu kali pada bulan Januari. Presiden Park juga telah dituduh angkuh dengan para pejabat senior dan tidak mentoleransi perbedaan pendapat. Ketertutupan Presiden Park Geun-hye terhadap media semakin memperkuat pendapat para kritikus bahwa demokrasi merupakan tantangan terbesar bagi Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye.

Kembali kebelakang, pada tahun 2014 juga Korea Selatan mengalami penurunan tren karena meningkatnya intimidasi dari lawan-lawan politik Presiden Park Geun-hye dan pemecahan pada kritik publik pada kepemimpinannya setelah terjadinya bencana nasional kecelakaan kapal *ferry* Sewol. Dalam upaya untuk mengendalikan rumor dan kritik yang ditujukan kepada presiden setelah bencana, tim *cyber investigation* didirikan pada bulan September 2014 untuk memantau media sosial dan menyensor atau mengadili mereka yang dianggap memfitnah Presiden Park. Hal ini menyebabkan jutaan warga Korea Selatan mencari "*cyberasylum*" dengan menggunakan *platform* media sosial berbasis asing. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan keseluruhan dalam pemerintahan. Pada bulan Agustus 2014, wartawan Jepang Tatsuya Kato ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik untuk publikasi di surat kabar *Sankei Shimbun* Jepang mengenai rumor palsu tentang adanya keterlibatan Presiden Park dalam insiden *ferry* Sewol, yang awalnya muncul di media Korea Selatan. Kato, yang dilarang meninggalkan negara itu, memasuki pembelaan "tidak bersalah" pada awal persidangan pada bulan Desember 2015. Juga pada bulan Desember, Mahkamah

Konstitusi Korea diperintah untuk membubarkan Partai Progresif Bersatu (UPP) dengan alasan bahwa ideologi pro-Korea Utara yang menjadi ancaman kepada pemerintah Korea Selatan. Keputusan itu menjadi pertama kalinya sebuah partai politik di Korea Selatan dibubarkan secara paksa.¹²

Dengan kondisi politik domestik Korea Selatan yang tidak stabil sangat mungkin apabila pemerintah Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Pemerintah Korea Selatan harus mengambil tindakan tersebut untuk menjaga kestabilan politik domestik dengan menghindari penyebab eksternal yang berpotensi mengganggu kestabilan politik juga keamanan nasional, disamping kenyataan bahwa masyarakat Korea Selatan masih memiliki trauma yang mendalam terhadap imperialisme yang dilakukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga tahun 1945.

b. Kondisi Ekonomi dan Militer Korea Selatan

Secara umum peringkat kemampuan ekonomi dan militer Korea Selatan masih rendah apabila dibandingkan dengan Jepang. Faktor kondisi ekonomi dan militer Korea Selatan menjadi alasan lain mengapa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang. Korea selatan menempati urutan ke 13 ekonomi dunia, sementara Jepang berada di urutan ke tiga ekonomi dunia. Begitu pun dengan kemampuan militer, tahun 2015 Korea Selatan berada di urutan 11 sementara Jepang berada di urutan ke tujuh.¹³

¹²Freedom House, 2015, “*South Korea : Trend Arrow*,” Freedom House dalam <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/south-korea>. Diakses pada 30 November 2016

¹³ FindTheData, 2015, “*South Korea*” World Economic Outlook (IMF) dalam <http://country-facts.findthedata.com/113/South-Korea> diakses 30 November 2016

Pada tahun 2014 Korea Selatan mengalami perlambatan ekonomi, dan masalah ekonomi terus berlanjut hingga tahun 2015. Juni 2015 Bank sentral Korea Selatan menurunkan acuan suku bunga sebesar 0,25 persentase poin ke rekor rendah 1,5 persen karena ekonomi terbesar keempat di Asia menghadapi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga. Wabah *Middle East Respiratory Syndrome* atau MERS di Korea Selatan pada saat itu mengancam penurunan konsumsi karena kurangnya pengeluaran konsumen. Dengan keadaan ekonomi yang sulit, pemerintah Korea Selatan diharuskan untuk bersikap fleksibel dalam memobilisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Sebuah laporan awal menunjukkan bahwa produk domestik bruto Korea Selatan pada periode Januari-Maret mencatat kenaikan suram 0,8 persen secara riil dari kuartal sebelumnya, menandai pertumbuhan kurang dari 1 persen selama empat kuartal berturut-turut. Mewabahnya virus MERS pada akhir Mei 2015 membuat diterapkannya tekanan tambahan pada bank sentral untuk mengurangi tingkat kebijakan. Wabah virus MERS menyebabkan sebanyak 67.000 wisatawan asing membatalkan kunjungan mereka dalam sembilan hari pertama bulan Juni 2015. Pusat perbelanjaan dan *supermarket* juga mengalami penurunan penjualan. Pada bulan April, *Bank of Korea* merevisi perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dari 3,4 persen menjadi 3,1 persen tetapi analis ekonomi berpendapat bahwa revisi tersebut masih dapat dikatakan sebagai hal yang ambisius mengingat ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan ekonomi Cina. Namun penyebaran virus MERS lebih lanjut dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ke tingkat antara 2 persen dan 3 persen. Ini

berarti merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2012, ketika ekonomi hanya tumbuh 2,3 persen.¹⁴

Lee Sang Jae dari *Seoul-based economist for Eugene Investment & Securities Co.*, mengatakan bahwa perbaikan ekonomi adalah tergantung bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah, sebagaimana yang dikutip berikut ini :

"Whether the Korean economy can post 3.0 per cent growth in 2016 depends on government efforts to stimulate domestic demand and an improvement in the external picture."

Selain itu Park Jung-woo dari *Korea Investment and Securities* mengatakan bahwa perlambatan ekonomi Korea Selatan salah satunya dipengaruhi perlambatan ekonomi Cina, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

*"Growth last year (2014) was not terrible thanks to consumption, but this year(2015) the recovery faces downside risks because the Chinese economy is worsening while government stimulus measures are unlikely to be bigger than last year."*¹⁵

Pandangan negatif mengenai ekonomi Korea Selatan terus bermunculan, bahwa ekonomi Korea Selatan sudah dalam cengkeraman deflasi. Indeks harga

14 Editorials, Juni 2015, "South Korea's economic troubles" The Japan Times dalam <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/06/18/editorials/south-koreas-economic-troubles/#.WD-6fjw2u00>. Diakses pada 30 November 2016

15 Editorials, Januari 2016, "South Korea economy slows in 2015 as exports suffer" Channel News Asia dalam <http://www.channelnewsasia.com/news/business/south-korea-economy-slows/2458510.html>. Diakses pada 30 November 2016

konsumen telah meningkat kurang dari 1 persen dari tahun sebelumnya selama enam bulan berturut-turut, dengan gambaran bulan Mei menambahkan kenaikan hanya 0,5 persen. Jika efek dari kenaikan harga tembakau pada bulan Januari tidak ditambahkan, indeks telah berada di wilayah negatif untuk empat bulan berturut-turut. Kenaikan tajam dalam nilai won terhadap yen telah menyebabkan ekspor yang mencapai sekitar 45 persen dari PDB nasional, untuk mencapai 10,9 persen pada Mei dari tahun sebelumnya, menandai penurunan selama lima bulan berturut-turut. Ini adalah faktor terbesar yang menekan perekonomian Korea Selatan. Produsen elektronik dan mobil menderita kerugian ekspor karena kalah saing dengan Jepang yang terus meningkatkan ekspor mereka karena Jepang menurunkan nilai yen terhadap dollar.

Penurunan suku bunga terbaru menurut *Bank of Korea* dipotong secara berturut-turut sejak bulan Agustus. Sebuah efek samping dari serangkaian penurunan suku bunga, ditambah dengan deregulasi dalam transaksi *real estate*, adalah pembengkakan kredit perumahan. Utang rumah tangga telah mencapai angka 1.100 triliun won, dan merupakan faktor yang menyebabkan permintaan domestik lamban. Jelas dampak dari penurunan suku bunga terbaru akan menjadi kecil. Tapi pemerintah Korea Selatan enggan meningkatkan belanja fiskal untuk merangsang ekonomi. Mengingat pengalaman krisis keuangan tahun 1997, bank sentral dilaporkan berhati-hati terhadap pelonggaran moneter, ketakutan bahwa pelonggaran yang agresif bisa mendorong perginya modal asing. Tetapi mengingat risiko deflasi, tambahan pelonggaran moneter skala besar serta belanja pemerintah untuk mendukung perekonomian muncul tak terelakkan sebagai obat jangka pendek, dan sebagai obat jangka menengah, Korea Selatan harus mengubah

struktur ekonomi, yang sangat tergantung pada ekspor - terutama pengiriman ke Cina – yang dipimpin oleh permintaan domestik.¹⁶

Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang semakin menunjukkan kemampuan ekonominya. Dengan mengusung *abonomics* atau paket reformasi ekonomi yang dirancang untuk menarik ekonomi Jepang keluar dari kemerosotan dua dekade yang ditandai dengan inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lamban, ekonomi Jepang tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan pada awal tahun 2015.¹⁷ Kondisi tersebut membangkitkan harapan cerah ekonomi Jepang, setelah mengalami resesi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai 0,6 persen pada periode awal tahun 2015. Kenaikan tersebut lebih baik dari kuartal sebelumnya. Juga lebih baik dari prediksi analis, yang memperkirakan kenaikan hanya sebesar 0,4 persen. Menurut para analis ekonomi, pertumbuhan itu bisa dibilang memiliki nilai sangat positif. Tony Nash, Kepala Ekonomi *Complete Intelligence*, mengatakan tampaknya pemulihan ekonomi Jepang telah menemui jalur yang benar.¹⁸

Jika kembali pada permasalahan Korea yang mengalami perlambatan ekonomi dari tahun 2014 bahkan terus berlanjut pada tahun 2015, terdapat pandangan bahwa situasi ekonomi Korea Selatan mirip dengan yang dialami Jepang sesaat sebelum masuk ke lesunya ekonomi Jepang yang cukup berkepanjangan pada tahun 1990-an. Jepang tidak bisa mengabaikan kemerosotan

¹⁶The Japan Times. *Loc., Cit.*

¹⁷ Stratfor's Analysis, Januari 2016, "Japan's Economy Is Back to Where It Started" Stratfor dalam <https://www.stratfor.com/analysis/japans-economy-back-where-it-started>. Diakses 30 November 2016

¹⁸ Sulung Prasetyo, 2016, "Pertumbuhan Ekonomi Jepang Naik Melebihi Prediksi" Sinar Harapan.Co dalam <http://www.sinarharapan.co/news/read/150521038/pertumbuhan-ekonomi-jepang-naik-melebihi-prediksi>. Diakses 30 November 2016

ekonomi Korea Selatan karena Korea Selatan merupakan tujuan terbesar ketiga dari ekspor Jepang. Untuk itu kerjasama ekonomi baik dalam tindakan riil maupun berupa *shared value* ataupun *experience* sangatlah diperlukan Korea Selatan dan Jepang.¹⁹ Disamping jika memperhatikan aspek emosional Korea Selatan masih berada dalam bayangan masa lalu imperialisme Jepang, dengan adanya pemberlakuan *Japan's New Security Bills*, akan mempengaruhi tingginya rasa tidak percaya diantara kedua negara. Rasa tidak percaya akan menghambat berbagai bentuk kerjasama bilateral termasuk kerjasama ekonomi kedua negara. Sehingga pantas jika Korea Selatan khawatir isu tersebut dapat mempengaruhi kerjasama bilateral ekonomi Korea Selatan dan Jepang.

Beralih pada kemampuan militer Korea Selatan, Korea Selatan berada di urutan ke-11 dari 126 negara.²⁰ Menurut *Global Fire Power rating index*, kekuatan militer Korea Selatan termasuk dalam predikat "*being perfect*". Korea Selatan menempati urutan ke-11 di dunia dalam hal kekuatan militer, menurut situs *Global Firepower* yang menyediakan penilaian tahunan peringkat kapasitas perang negara dengan memperhitungkan jumlah dan keragaman senjata, faktor geografis, logistik, sumber daya alam, industri dan tenaga kerja. Sementara kepemimpinan politik atau militer saat ini tidak dianggap. Korea Selatan turun dari peringkat ketujuh pada tahun 2015 dan peringkat kesembilan pada tahun 2014. Sementara Jepang setelah memberlakukan undang-undang yang baru atau

¹⁹The Japan Times. *Loc., Cit.*

²⁰GFP Team, 2016 "*South Korea Military Strength : Current military capabilities and available firepower for 2016 detailed*" Global Fire Power dalam http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=south-korea. Diakses pada 30 November 2016

Japan's New Security Bills naik dua peringkat ke urutan tujuh, setelah di tahun 2015 Jepang menempati urutan kesembilan dan ke-10 pada tahun 2014.²¹

Korea Selatan terus berupaya untuk meningkatkan kekuatannya, mengingat bukan hanya Korea Utara yang mengancam keamanan negaranya tetapi Korea Selatan perlu menyeimbangkan kekuatan militer dengan Jepang berkaitan dengan Jepang yang telah memberlakukan *Japan's New Security Bills* nya. Departemen Pertahanan Nasional (*The Ministry of National Defense*) menyatakan pada 3 Juli 2013 bahwa anggaran pertahanan nasional Korea Selatan perlu ditingkatkan menjadi 7,3% setiap tahun sampai tahun 2017 dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan estimasi dalam lingkungan strategis, dan untuk mendukung pelaksanaan misi tanpa cela militer Korea Selatan. Departemen Pertahanan Nasional Korea Selatan juga menyatakan kebutuhan ini melalui "*National Defense Budget, the Driving Force that Safeguards the Survival of the ROK and the Happiness of the People.*" Yang merupakan buku publikasi yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli, dan menekankan, secara khusus, peningkatan anggaran kemampuan pertahanan perlu ditingkatkan menjadi 1 triliun Won Korea setiap tahunnya.²²

Departemen Pertahanan Nasional Korea Selatan menjelaskan bahwa sekitar 1,7 triliun KRW akan dibutuhkan sampai tahun 2017 untuk transisi struktur tenaga kerja menjadi sebuah struktur yang efisien dengan mengurangi

21 The Korea Herald's National Defense, 2016 "*Graphic News South Korean military ranks No.11*" The Korea Herald dalam <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160413000134>. Diakses pada 30 November 2016

22 Global Security Military Menu, 2016, "*South Korea : Defense Budget*" Global Security.Org dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/rok/budget.htm>. Diakses pada 30 November 2016

jumlah pasukan berdiri dan meningkatkan jumlah *cadres*, dan sekitar 1,4 triliun KRW untuk meningkatkan gaji anggota militer selama periode waktu yang sama. Departemen Pertahanan Nasional juga menyatakan tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas kondisi hidup anggota militer dengan menyatakan bahwa sekitar 2,4 triliun KRW akan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pakaian, sekitar 5,4 triliun KRW untuk mengakuisisi kafetaria yang higienis yang mengacu standar HACCP, dan sekitar 890 miliar KRW untuk perbaikan fasilitas barak.

Salah satu pejabat Departemen Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan beberapa rencana penggunaan anggaran, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

*"The mid-term budget plan also focuses on improving circumstances at the barracks and increasing monthly payments to enlistees by more than double. We also aim to augment the investment in research and development from the current 6.5 percent of the total defense budget to 8.4 percent by 2020 to further promote defense fields."*²³

Dengan fakta bahwa kekuatan militer Jepang berada di peringkat atas, sangat wajar apabila Korea Selatan mengkhawatirkan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* dapat mengganggu keamanan nasional Korea Selatan dan stabilitas keamanan wilayah regional Asia Timur. Karena dengan *Japan's New Security Bills*, Jepang berpotensi melakukan praktik militernya di wilayah Semenanjung Korea dengan dalih membantu menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan regional meskipun tidak ada izin dari pemerintah Korea Selatan.

23 Oh Seok-min, April 2015, "South Korea to raise defense spending by 2020" Yonhap News Agency dalam <http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN20150417009700315>. Diakses pada 30 November 2016

c. Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Antara Jepang dan Korea Selatan

Alasan lain yang menjadi penyebab pemerintah Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* adalah kekhawatiran pemerintah Korea Selatan terhadap potensi Undang-undang tersebut yang akan mempengaruhi perebutan klaim atas Pulau Dokdo/Takeshima oleh Jepang yang merupakan alasan berdasarkan konteks internasional dalam bentuk *hostility*. *Japan's New Security Bills* selain memungkinkan Jepang untuk melakukan *Collective Self-defense*, secara otomatis akan membuat Jepang meningkatkan kekuatan militernya. Telah terbukti bahwa di tahun 2016 setelah Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills* peringkat kekuatan militer Jepang naik menjadi urutan ketujuh dari 126 negara, berbeda dengan Korea yang turun menjadi urutan ke-11.

Persengketaan pulau yang merupakan sengketa utama dalam sengketa diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan dikenal dengan beberapa nama. Korea Selatan menyebutnya Pulau Dokdo, yang berarti Pulau Soliter. Jepang menyebutnya Takeshima, yang berarti Pulau Bambu. Serta sebelumnya dikenal dengan nama *Liancourt Rocks*, yang dinamai oleh pemburu paus asal Perancis setelah pelayaran mereka pada tahun 1849. Fakta yang menarik adalah Pulau Dokdo/Takeshima tidak hanya di klaim oleh Jepang dan Korea Selatan tetapi Korea Utara pun ikut mengklaim pulau tersebut. Pulau Dokdo/Takeshima sendiri terdiri dari dua pulau utama dan terdapat sekitar 30 *smaller rocks*. Jepang dan Korea Selatan mengatakan mereka memiliki ikatan sejarah yang lama, sehingga mereka berhak mengklaim pulau tersebut. Korea Selatan menduduki Pulau Dokdo sejak tahun 1954, pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa Jepang telah

mengakui bahwa Pulau Dokdo sebagai wilayah teritorial Korea Selatan pada tahun 1969 setelah kesepakatan antara *Fishermen* Korea dan Jepang.²⁴

Pemerintah Korea Selatan dalam *Website* pemerintah yang berfokus pada permasalahan sengketa Pulau Dokdo/Takeshima menuliskan bahwa Pulau Dokdo/Takeshima secara resmi ditempatkan di bawah yurisdiksi *Uldo county* pada tahun 1900, tetapi dianeksasi oleh Jepang pada tahun 1905 menjelang penjajahan semenanjung Korea. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang mengembalikan Pulau Dokdo, karena Pulau Dokdo adalah bagian integral dari wilayah Korea secara historis, geografis dan di bawah hukum internasional.

Menanggapi hal tersebut Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan di *website* pemerintahnya bahwa Jepang didirikan atas kedaulatan pulau-pulau pada pertengahan abad ke-17, pelaut yang menggunakannya sebagai port navigasi, titik *docking* untuk kapal dan *fishing ground* yang kaya. Kemudian Pulau Dokdo/Takeshima dimasukkan ke dalam pulau modern prefektur Shimane pada tahun 1905. Korea Selatan bertindak ilegal dengan menyatakan wilayahnya pada tahun 1952, karena Pulau Dokdo/Takeshima tidak termasuk dalam wilayah yang harus dikembalikan di bawah *San Francisco Peace Treaty*.²⁵

Dalam proses penyusunan *San Francisco Peace Treaty* (yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951, terhitung sejak 28 April 1952), yang termasuk disposisi akhir dari wilayah Jepang setelah Perang Dunia II, Republik Korea meminta agar Amerika Serikat menambahkan Takeshima untuk

²⁴BBC Asia, 2012, "Profil : Dokdo/Takeshima islands" BBC News dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-19207086>. Diakses pada 1 Desember 2016

²⁵*Ibid.*

wilayah yang akan meninggalkan Jepang. Namun, Amerika Serikat dengan tegas menolak permintaan ini, mencatat bahwa Takeshima itu "...tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari Korea..." tapi merupakan wilayah Jepang. Ini dibuktikan dengan dokumen diplomatik yang diungkapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam konteks ini, *San Francisco Peace Treaty* berisi "Korea, termasuk pulau-pulau dari Quelpart, Pelabuhan Hamilton dan Dagelet" sebagai wilayah yang Jepang harus tinggalkan, sementara Takeshima termasuk milik Jepang. Dengan demikian perjanjian yang disepakati dunia internasional pasca-Perang Dunia II, menegaskan bahwa Takeshima adalah wilayah Jepang. Selain itu, setelah perjanjian mulai berlaku, Amerika Serikat diberitahu Jepang bahwa Takeshima akan digunakan untuk wilayah pemboman jarak. Berdasarkan perjanjian dengan Amerika Serikat, Jepang menunjuk Takeshima sebagai lokasi pengeboman, dan mengumumkannya kepada publik. Di bawah perjanjian internasional setelah Perang Dunia II, Takeshima adalah pulau yang tegas diakui sebagai wilayah Jepang.²⁶

Untuk mencoba memahami hubungan Korea Selatan dan Jepang dengan berfokus pada dinamika hubungan kontemporer adalah dengan mendapatkan hal-hal yang berbau emosional. Ditambah dengan belitan kebencian sejarah masa lalu dan kebenaran yang sangat penting muncul: dari perspektif Korea Selatan, sengketa Pulau Dokdo ini merupakan gambaran besarnya. Potensi emosional dari permasalahan sengketa Pulau Dokdo/Takeshima di Korea Selatan sendiri membuktikan betapa besarnya kekuatan sejarah. Permasalahan sengketa ini telah berhasil menyatukan seluruh orang Korea, tidak memandang apapun pandangan

²⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014 "*10 Points to Understand The Takeshima Dispute*" Northeast Asia Division, Asian and Oceanian Affairs Bureau Ministry of Foreign Affairs of Japan

politik mereka dan hal tersebut menjadi peristiwa yang langka karena masyarakat Korea sendiri secara ideologi maupun pandangan politik terbagi menjadi beberapa golongan.

Opini yang menyebar di Korea Selatan, sengketa ini merupakan bagian dari memori sejarah sehingga masyarakat Korea tidak bersedia untuk melepaskan klaim atas Pulau Dokdo, dan tidak menginginkan sengketa ini dibawa untuk di selesaikan di ICJ (*International Court of Justice*). Dari perspektif Korea Selatan kehilangan klaim atas Pulau Dokdo berarti Korea Selatan harus tetap menuruti legitimasi Jepang seperti di masa imperialisme. Di sisi lain, masyarakat Korea berpikir selama mereka masih memiliki yurisdiksi yang efektif, tidak ada poin untuk mengambil keputusan yang beresiko yang membuat mereka bisa saja kehilangan klaim atas Pulau Dokdo. Terlebih didukung penilaian bahwa rujukan Jepang yang diserahkan ke ICJ (*International Court of Justice*) dianggap valid oleh ICJ.

Sangat penting untuk bisa memahami makna yang kuat secara emosional bagaimana pulau-pulau memiliki peran sebagai sebuah identitas nasional di kedua negara, terutama di Korea. Konsesi dari anggota parlemen Korea jika mereka memutuskan menyerahkan klaim Pulau Dokdo sama saja dengan bunuh diri politik, sehingga hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Demikian juga dengan Jepang, Jepang tidak mungkin menyerahkan klaim atas Pulau Takeshima. Kondisi tersebut memperjelas bahwa, selama dua negara tetap tidak bisa memulai

percakapan publik atas masalah ini, hubungan diplomatik hanya akan berjalan dengan sangat lambat, bahkan bisa saja tidak sama sekali berjalan.²⁷

Dalam menghadapi permasalahan persengketaan Pulau Dokdo/Takeshima, pemerintah Korea Selatan melakukan langkah seperti mengedukasi para siswa sekolah menengah hingga jenjang universitas untuk menguatkan logika bahwa Pulau Dokdo adalah milik Korea Selatan. Kementerian Luar negeri Korea Selatan sempat melakukan *public lecture* pada tahun 2014. Che Dong-hwan, dari kementerian luar negeri pada saat itu mengatakan tujuan diadakannya *public lecture* mengenai permasalahan Pulau Dokdo, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

“We want to arm you with the logic you need to convince foreigners that Dokdo is ours through this lecture.”

Public lecture yang dilaksanakan pemerintah Korea Selatan adalah bagian dari perang propaganda yang terus berkembang dalam sengketa selama puluhan tahun lebih. Keinginan Korea Selatan untuk memiliki Pulau Dokdo juga mencerminkan kebencian terhadap Jepang, masyarakat Korea Selatan tidak akan mungkin melupakan sejarah masa lalu ketika Jepang melakukan imperialismenya dari tahun 1910 hingga tahun 1945 di semenanjung Korea, dan hal tersebut akan selalu menjadi salah satu dasar dari opini publik dan politik di Korea Selatan. Terbukti dengan Presiden Park Geun-hye yang tidak mau menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe terkait dengan penyelesaian sengketa pulau dan militerisme Jepang di masa lalu pada tahun 2014.

²⁷ Dong-Joon Park & Danielle Chubb, 2011, “*Why Dokdo Matters to Korea*” The Diplomat Magazine dalam <http://thediplomat.com/2011/08/why-dokdo-matters-to-korea/>. Diakses pada 1 Desember 2016

Salah satu siswa yang menghadiri *public lecture* juga mengungkapkan pendapatnya mengenai klaim Korea Selatan atas Pulau Dokdo, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

“I don’t think we should unnecessarily antagonize Japan, but Japan needs to understand its own wrongdoing and apologize about it.”

Berbeda dengan Korea Selatan, Kementerian Pertahanan Jepang merilis laporan tahunan dimana mereka menggambarkan pulau Takeshima sebagai wilayahnya, sehingga memicu kemarahan dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan ketidakterimaannya sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“The Japanese government should be well aware that if it continues laying unjustifiable claims to Dokdo, it will be a long time before the two countries will see improvement in their relations.”

Namun Kementerian Luar Negeri di Tokyo tetap mempertahankan pernyataan mengenai Pulau Takeshima, menjelaskan dalam 12 bahasa bahwa Jepang mendirikan kedaulatan negara atas pulau-pulau pada pertengahan abad ke-17. Serta Jepang tetap merayakan hari Takeshima secara tahunan yang dimulai sejak tahun 2005 yang memicu protes besar dari masyarakat Korea Selatan di Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan.²⁸

Masih di tahun 2014, Kementerian Pendidikan Jepang merubah isi *text book* untuk para siswa sekolah menengah dan menengah atas, dan menekankan

²⁸The Japan News National, 2014 “*Barren rocks fuel South Korean passions in islet spat with Japan*” The Japan Times dalam <http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/13/national/barren-rocks-fuel-south-korean-passions-islet-spat-japan/#.WEEDjTw2u00>. Diakses pada 1 Desember 2016

bahwa Pulau Takeshima yang disengketakan adalah benar-benar milik Jepang. Menteri pendidikan, Hakubun Shimomura mengatakan bahwa kementerian pendidikan merevisi *text book* pelajaran sejarah agar para siswa belajar dengan benar mengenai sejarah Jepang dan memberi kejelasan bahwa Pulau Takeshima adalah milik Jepang.

Menanggapi hal tersebut pemerintah Korea Selatan memanggil duta besar Jepang untuk memprotes klaim Jepang atas pulau Dokdo/Takeshima. Pemerintah Korea Selatan memberikan pernyataan menanggapi tindakan Jepang, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

"Our government strongly condemns this and asks Japan to immediately withdraw it."

Hubungan Jepang dengan Korea Selatan semakin tegang atas sejumlah isu, termasuk mengenai teritorial dan kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akhir tahun 2014 ke Kuil Yasukuni, di mana penjahat perang dihukum bersama dengan jutaan korban perang.²⁹

Persengketaan Pulau Dokdo/Takeshima ini menjadi persengketaan yang signifikan mempengaruhi hubungan diplomatik Jepang dengan Korea Selatan. Dengan kondisi masyarakat Korea Selatan yang terus mengingat imperialisme Jepang di masa lalu sehingga trauma mendalam terus tertanam menjadi keputusan yang tepat bagi pemerintah Korea Selatan untuk merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Pemerintah Korea Selatan diharuskan untuk selalu

²⁹World News, 2014 "*Disputed islands are ours, Japan's new textbooks claim*" NBC News dalam http://worldnews.nbcnews.com/_news/2014/01/28/22477682-disputed-islands-are-ours-japans-new-textbooks-claim. Diakses pada 1 Desember 2016

berusaha menjaga kepentingan nasionalnya yaitu kemerdekaan yang telah diarah dengan menjaga wilayah teritorialnya dari berbagai macam potensi eksternal yang mengancam keamanan nasionalnya termasuk pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang.